

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Inspektorat Kota Batu

Herlince Andelo^{1*}, Roro Merry Chornelia Wulandary², Firman Firdausi³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Abstract

The title of this research is Analysis of Accountability of Regional Financial Management in Batu City Inspectorate. This study's goal is to ascertain Batu City Inspectorate's regional financial management's responsiveness. Accountability is essential to ensure that regional financial management runs effectively, openly, and in accordance with laws and regulations. This research uses a qualitative methodology, collecting data through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that Batu City Inspectorate has implemented fairly good regional financial management procedures. However, there are still obstacles in the form of suboptimal use of technology in financial reporting and lack of knowledge about process devices. While the internal control system has been functioning effectively, we still need staff training and transparency in the reporting process to enhance regional financial accountability.

Keywords:

Accountability, Management, Regional Finance.

Article History

Received 9 April 2025

Accepted 18 June 2025

*Corresponding Author:

Herlince Andelo

herlinceandelo201203@gmail.com

Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik. Menurut Dwiyanto (2009: 98), akuntabilitas merupakan tolok ukur akuntabilitas birokrasi pemerintah dalam menjalankan proses dan aturan pelayanan publik. Persoalan pengelolaan keuangan daerah yang muncul di Indonesia adalah terkait dengan nepotisme, kolusi, dan korupsi (KKN). Dengan demikian, akuntabilitas merupakan suatu kewajiban, dan wakil pemerintah atau mereka yang diberi tugas untuk mengawasi sumber daya publik yang terkait dengannya harus mampu menanggapi pertanyaan tentang kewajibannya (Tjokroamidjojo, 2009: 5).

Menurut Ismiarti (2013), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya dan dikomunikasikan secara berkala melalui media pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2018), penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perilaku dan kinerja keuangan seseorang merupakan proses akuntabilitas. Kemampuan untuk menjadi sumber data terbuka diperlukan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi hak-hak publik seperti hak untuk tahu, hak untuk memperoleh informasi, dan kebebasan untuk menyampaikan gagasan.

Salah satu komponen penting administrasi publik yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran adalah pengelolaan keuangan daerah. Prinsip dasar akuntabilitas mengamanatkan bahwa pengelola keuangan mengawasi sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Akuntabilitas dalam pemerintahan daerah mengacu pada tugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan anggaran dan pengeluaran uang publik. Menurut Halim (2001), pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat meningkatkan output dan membantu pencapaian tujuan perusahaan. Pengelolaan keuangan daerah, menurut Bratakusumah dan

Solihin (2004), mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dievaluasi dengan keuangan dalam kerangka APBD dan dikelola secara efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Kedua sudut pandang tersebut berpendapat bahwa keberhasilan keuangan pemerintah daerah secara langsung terkait dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Seiring dengan meningkatnya praktik pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan daerah pun akan meningkat. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah, meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memvalidasi hal ini.

Metode Penelitian

Peneliti merupakan pemain kunci dalam pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini, yang didasarkan pada postpositivisme. Studi dokumen, wawancara, dan observasi merupakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memahami pengalaman subjektif individu atau kelompok yang terlibat. Komponen utama untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang realitas sosial yang diteliti adalah interaksi antara peneliti dan partisipan. Peneliti berharap dapat membahas dan memahami secara menyeluruh penelitian Inspektorat Kota Batu tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan metode ini. Lokasi penelitian dipilih dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang teknik yang digunakan, mengingat peran penting Inspektorat dalam menilai tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Fokus utama penelitian ini adalah tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah Inspektorat Kota Batu.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Inspektorat Kota Batu

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang meliputi pelaporan, penyajian, dan pengiriman laporan kepada instansi terkait atas semua kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang negara. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Untuk menjaga asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan masyarakat, maka tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan secara sistematis, efisien, transparan, dan akuntabel. Pilar utama yang menjadi landasan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik dan amanah adalah akuntabilitas. Sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat Kota Batu berperan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berpegang teguh pada nilai-nilai keterbukaan dan akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

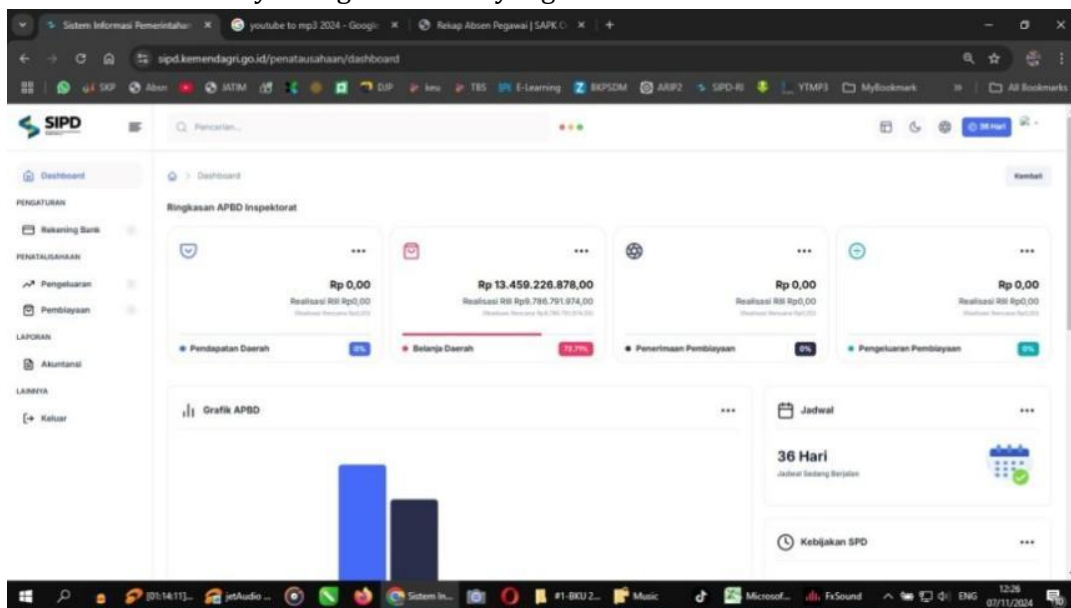
Akuntabilitas

Pengelolaan anggaran Inspektorat Kota Batu telah berjalan sesuai dengan praktik yang baik dan terbuka. Setiap pelaksanaan anggaran di Inspektorat wajib disertai dengan SPJ yang merupakan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan APBD. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan praktik keuangan yang baik. Konsep pengelolaan keuangan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel. Setiap elemen ini saling berhubungan dan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi,

partisipasi, dan kepatuhan terhadap regulasi agar anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya proses ini, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran yang dikelola benar-benar dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Transparansi

Mekanisme yang efektif untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah disediakan oleh proses penyiapan dan persetujuan anggaran di Inspektorat dan SKPD lainnya (Kurniawan et al, 2023). Peninjauan dan persetujuan anggaran oleh DPRD menjamin bahwa badan legislatif mengawasi dan menyetujui alokasi anggaran selain administrasi. Hal ini meningkatkan kontrol publik terhadap penggunaan anggaran dan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas dan terbuka rencana penggunaan dana untuk kegiatan daerah. Selain itu, DPA yang telah disetujui oleh DPRD menjadi pedoman yang mengikat bagi pelaksanaan kegiatan, yang selanjutnya dapat diawasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun.



Gambar 1. Aplikasi SIPD RI
(Sumber : Data Sekunder, 2024)

Efisiensi dan Efektifitas

Selain menjamin bahwa seluruh proses mematuhi rencana dan aturan yang relevan, tinjauan triwulanan memungkinkan identifikasi cepat tantangan dan masalah dalam manajemen anggaran. Sementara itu, aplikasi SIPD berperan penting dalam meningkatkan kinerja manajemen keuangan dengan memungkinkan identifikasi masalah secara cepat dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Integrasi kedua upaya ini telah memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran di Inspektorat Kota Batu. Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan evaluasi berkala dan teknologi inovatif seperti SIPD sangat efektif dalam memperbaiki pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Keterpaduan

Tujuan utama penerapan SIPD adalah untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi dalam pengelolaan data dan informasi keuangan daerah secara lebih efisien, terorganisir, dan transparan, sesuai dengan dokumentasi tentang integrasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penggunaan aplikasi terintegrasi yang dimungkinkan oleh SIPD. Hal ini memungkinkan pertukaran dan pengelolaan data yang lebih efisien antara entitas pemerintah yang sebelumnya beroperasi secara terpisah.

Kepatuhan pada regulasi

LRA sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik secara efektif. Dengan adanya pelaporan secara berkala, Insdada dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan tanggung jawab dalam setiap aspek anggaran pengelolaan. LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan anggaran suatu organisasi, terutama dalam konteks pemerintahan. LRA menunjukkan realisasi atau pencapaian terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran. Laporan ini digunakan untuk memastikan bahwa anggaran yang direncanakan telah dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa Penganggaran dan pelaporan anggaran di Inspektorat Kota Batu sudah mengikuti regulasi yang berlaku, yang mengharuskan adanya pelaporan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam pengelolaan anggaran daerah. Kesesuaian dengan regulasi ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Faktor pendukung

Seluruh peran yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah telah diisi oleh personel yang berkualifikasi. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah secara efektif ditunjukkan dengan terciptanya lingkungan manajemen yang mendukung dimana masing-masing komponen pengelolaan keuangan daerah mempunyai tujuan dan tugas masing-masing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan kemampuan sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen penting lainnya. Aparatur pengelola keuangan daerah harus dilatih dengan baik dan diberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Pengembangan kompetensi tersebut akan menjadikan aparatur pengelola keuangan daerah semakin kompeten dan siap, sehingga pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik dan transparan. Kualitas pengelolaan dan pengawasan anggaran Inspektorat akan menjadi fokus utama peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah, sesuai dengan kedua kriteria pendukung tersebut. Dengan demikian, apabila memiliki kemampuan yang memadai, pengelolaan keuangan daerah akan semakin optimal dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 2. peningkatan SDM
Sumber: Data Sekunder,2024

Gambar di atas menunjukkan pelatihan untuk implementasi pengawasan APiP dan pengembangan sumber daya manusia kerangka kebijakan manajemen keuangan daerah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM Inspektorat Kota Batu dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan memahami dan menguasai standar dan prosedur pengawasan yang benar, pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di inspektorat kota batu adalah Pergantian pejabat pengelola keuangan daerah,hal ini dapat menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena mengganggu kontinuitas, efisiensi, dan pengawasan yang diperlukan untuk menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Masalah koneksi dan stabilitas jaringan , terutama terkait dengan penggunaan SIPD yang terpusat pada server Kemendagri, menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Inspektorat Kota Batu.

Keterbatasan akses ke sistem, keterlambatan dalam pencatatan dan pelaporan, serta gangguan pada pengawasan dan audit dapat mengganggu proses pengelolaan anggaran yang sudah terjadwal dan menghambat akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penguatan infrastruktur jaringan, pembangunan server cadangan, atau pengembangan sistem yang lebih fleksibel untuk mengurangi ketergantungan pada satu server pusat.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Inspektorat Kota Batu merupakan komponen penting yang mencerminkan kewajiban pemerintah daerah untuk menginformasikan, melaporkan, dan mengungkapkan kepada instansi terkait segala kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan dana publik. Asas ketertiban, ketaatan pada ketentuan perundang-undangan, serta pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab, terbuka, efektif, dan efisien menjadi landasan bagi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan yang terpadu. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, mendorong terciptanya struktur pengawasan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Upaya Inspektorat Kota Batu untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah dilandasi oleh beberapa komponen penting, antara lain terciptanya sistem pengendalian intern yang efektif, peningkatan kompetensi aparatur, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Keterbatasan waktu, kendala koneksi jaringan, dan perubahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah merupakan beberapa tantangan yang dihadapi saat ini. Berbagai tantangan tersebut harus terus ditingkatkan dan diatasi, serta unsur-unsur pendukung yang ada saat ini harus dioptimalkan, agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan secara efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Laetitia Boliina Kromen, M. ., A. Manafe, H. ., & Perseveranda, M. . (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 460–468.
- Kurniawan, L., Warman, K., & Fendri, A. (2023). Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 484-496.
- Dwiyanto, A. 2009. *Mewujudkan good governance: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ismiarti. 2013. *Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah, Tesis*. Bengkulu: Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu.
- Mardiasmo.M. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, M. 2018. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan wali kota Batu Nomor 95 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan wali kota batu Nomor 107 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
- Sugiyono. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif RnD*. Bandung: Alfabeta
- Tjokroamidjojo, M. 2009. *Akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya publik*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo.